

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Anisa Desi Safitri¹, Dwika Lodia Putri², Zaharman³

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Papua Barat Telp. (0962) 52581
E-mail : dwikalodiaputri@unilak.ac.id (Korespondensi)

Abstract: The purpose of this research is to find out and analyze the government's financial performance in the Fifty Cities Regency Finance Agency in 2017-2021 by using the ratio of degrees of fiscal decentralization, the ratio of independence, the ratio of PAD effectiveness, the ratio of efficiency, and the ratio of activity. The object of this research is the Budget Realization Report obtained from the Fifty Cities District Finance Agency, the type of data used is quantitative data in the form of a report on the realization of the Fifty Cities District budget for 2017-2021. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, documentation, literature studies and interviews. The results of the study show that based on data analysis and discussion that has been carried out the government's financial performance at the Lima Puluh Kota Regency Financial Board seen from the Ratio of the Degree of Fiscal Decentralization and the Ratio of Regional Financial Independence are still in the "very less" category, the Effectiveness Ratio is in the "effective" category, the Ratio Efficiency in the "less efficient" category was only "efficient" with a percentage of 70% in 2018, the Activity Ratio in operating expenditures was in the "good" category, and in capital expenditures it was in the "bad" category.

Keywords: *Analysis, Financial Performance, and Government*

Sebagai konsekuensi dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan tugasnya dengan transparansi. Permasalahan tentang keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggung jawaban fisik daerah untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil melaksanakan tugasnya atau tidak.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan baik, berdasarkan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dalam memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan ini dapat digunakan untuk evaluasi dan pemulihan kinerja dengan membandingkan rencana kinerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Pengukuran kinerja keuangan ini dapat digunakan untuk evaluasi dan pemulihan kinerja dengan membandingkan rencana kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Dengan adanya otonomi daerah ini mengakibatkan terjadinya penyerahan wewenang sistem pemerintahan pada Kabupaten Lima puluh kota, karena itu Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah untuk menilai apakah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil dan menjalankan tugasnya dengan baik

Judul penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa orang

sebelumnya contohnya dari (Kusumadewi, Wahidah, Niken, 2016) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014, dari (Mega Oktavia, Ropa., 2016) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan yang terakhir yaitu dari (Muhammad,Zuhri.,Ahmad, Soleh, 2016) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.dan penelitian ini *replica* dari penelitian (Kusumadewi, Wahidah, Niken, 2016) dan dipenelitian saya ini saya menambahkan rasio yang tidak ada pada penelitian sebelumnya.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian adalah Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021.

Menurut (Sugiyono, 2016) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 - 2021.cara menganalisis Lapora Realisasi Anggaran nya adalah dengan menghitung rasio keuangannya sehingga dari penghitungan rasio tersebut bisa terlihat apakah kinerja keuangan pemerintah pada Badan keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini sudah baik atau belum.

Dalam penelitian ini, saya tidak melakukan wawancara teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: (1) Metode pengamatan langsung (observasi), (Sugiyono, 2016) yaitu teknik pengumpulan data dengan pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian atau kelengkapan yaitu Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. (2) Dokumentasi, pengumpulan data dengan

mempelajari, memahami, dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah, seperti laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota.

Studi kepustakaan, dengan cara membaca buku-buku, referensi dan literature yang berhubungan dengan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Keuangan (Sugiyono, 2016), Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang terlebih dulu mengumpulkan data setelah itu mengolah dan menganalisa data, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL

Pengukuran Kinerja *sector public* dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya pembuatan keputusan dan untuk mewujudkan pertanggung jawaban *public* dan memperbaiki komunikasi kelembagaannya, dan dalam penelitian ini menggunakan beberapa rasio yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian,rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas.

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah } t}{\text{Target Pendapatan Daerah } t} \times 100\%$$

Tabel 1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Rasio Derjat Desentralisasi Fiskal pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF %
1	2017	119.771.917.448	1.175.862.309.267	10%
2	2018	73.440.846.296	1.257.168.413.662	5.8%
3	2019	85.168.153.332	1.336.485.510.303	6.3%
4	2020	77.429.483.703	1.209.471.396.990	0.6%
5	2021	79.852.144.928	1.260.792.546.305	6.3%
Rata-Rata Skala Interval Rasio DDF tahun 2017-2021				5.8 %

Sumber : Data diolah hasil penelitian 2022 Berdasarkan tabel 1 diatas dapat

dilihat rasio Derjat Desentralisasi Fiskal pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota 2017-2021 bisa dikatakan 'sangat kurang'. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat PAD nya masih sangat kurang baik terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Rasio Kemandirian pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021

N o	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian %
1	2017	119.771.917.48	1.154.770.087.419	10.4%
2	2018	73.440.846.296	1.180.687.551.730	6.2%
3	2019	85.168.153.332	1.124.675.086.681	6.9%
4	2020	77.429.483.703	1.121.707.914.904	6.9%
5	2021	79.852.144.928	1.110.702.712.333	7.1%
Rata-Rata skala Interval Rasio Kemandirian 2017-2021				7.5 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 masih 'sangat kurang', hasil tertinggi itu pada tahun 2017 yaitu 10.4% itu saja masih tergolong 'kurang'. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat kurang pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah nya masih bergantung kepada pemerintah pusat.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Rasio Efektivitas pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021

N o	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas %
1	2017	119.771.917.48	124.674.805.528	96%
2	2018	73.440.842.296	87.316.059.100	84%
3	2019	85.168.153.332	97.066.864.032	88%

4	2020	77.429.483.703	86.666.035.373	89%
5	2021	79.852.144.926	111.968.130.125	71%
Rata-Rata Skala Interval Rasio Efektivitas tahun 2017-2021				85.6%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat perhitungan rasio efektivitas pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 secara keseluruhan sudah 'Cukup Efektif'. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah 'cukup efektif' dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah nya.

$$\text{Rasio Efisiensi Realisasi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Rasio Efisiensi pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021

N o	Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi %
1	2017	1.108.720.993.539	1.275.862.309.267	86%
2	2018	1.103.111.883.976	1.257.168.413.662	70%
3	2019	1.203.919.440.423	1.336.485.510.303	90%
4	2020	1.063.823.655.942	1.209.471.396.990	88%
5	2021	1.266.371.638.222	1.260.792.546.305	100%
Rata-Rata Skala Interval Rasio efisiensi tahun 2017-2021				86.8%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat perhitungan rasio efisiensi pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 secara keseluruhan 'cukup efisien'.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{total belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Rasio aktivitas pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021

No	Tahun	Total belanja operasi	Total belanja daerah	Belanja operasi %
1	2017	873.419.842.485	1.108.720.993.539	78%
2	2018	870.327.418.512	1.103.111.883.976	79%
3	2019	950.349.059.201	1.203.919.440.423	79%
4	2020	874.999.821.692	1.063.823.655.942	82%
5	2021	956.701.509.114	1.266.371.638.222	78%
Rata-Rata Skala Interval Rasio Aktivitas belanja operasi tahun 2017-2021				79.2%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat perhitungan rasio aktivitas pada belanja operasi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021, secara keseluruhan bisa dikatakan 'baik'. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik dalam pelaksanaan belanja operasi.

Rasio Belanja Modal

$$= \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah dengan Rasio aktivitas pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021

No	Tahun	Total belanja modal	Total belanja daerah	Belanja modal %
1	2017	233.117.426.709	1.108.720.993.539	21%
2	2018	232.636.603.714	1.103.111.883.976	21%
3	2019	252.910.521.752	1.203.919.440.423	21%
4	2020	152.712.089.645	1.063.823.655.942	14%
5	2021	147.622.625.109	1.266.371.638.222	11%
Rata-Rata Skala Interval Rasio Aktivitas belanja modal tahun 2017-2021				17.6%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat perhitungan belanja modal pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 'tidak baik'. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak baik/ belum baik dalam melaksanakan belanja modal.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan total pendapatan pada Badan

Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 masih tergolong 'sangat kurang' dengan rata-rata 5.8%.

Berdasarkan perhitungan presentase yang tertinggi itu hanya mencapai 10% ditahun 2017, terendah itu 0.6 % ditahun 2020, dan belum ada yang mencapai 50% dari tahun 2017- 2021. dapat diartikan bahwa kinerja pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dalam mengelola PAD dengan menggali potensi daerahnya dibidang pariwisata karena di daerah kota Payakumbuh atau Kabupaten Lima Puluh Kota sangat banyak tempat wisata yang menarik peminat wisatawan luar untuk berkunjung contohnya Lembah Harau, Taram, Taman Bodi, Batang Tabik, Kayu Kolek, Kubu Jawi, Padang Mangateh, dll. jika dibandingkan dengan kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014 lebih baik dari pada kinerja keuangan pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota jika dilihat dari rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini.

Selanjutnya pada tabel 2 dapat dilihat bagaimana perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menggambarkan kemampuan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Faizah, 2021). Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih termasuk masih 'sangat kurang', bisa dilihat pada tabel 2 bahwa hasil presentase rata-rata nya 7.5% tertinggi itu hanya 10,4% ditahun 2017 dan terendah 6.2% ditahun 2018 dan tidak ada yang mencapai 50 % dari tahun 2017-2018. Bisa dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan lagi dalam pengelola PAD dan sumber pendapatan lainnya. Kinerja

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014 lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja keuangan pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perhitungan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tabel 3 dapat dilihat bagaimana kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah, Pada penghitungan Rasio Efektivitas pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 sudah termasuk 'efektif', dengan rata-rata 85.6% presentase tertinggi 98% ditahun 2017 dan yang terendah 71% ditahun 2021. Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011-2014 masih lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 jika dilihat dari rasio Efektivitas ini.

Selanjutnya berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi pada tabel 4 dapat dilihat bagaimana perbandingan antara besarnya biaya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Faizah, 2021). pada perhitungan Rasio Efisiensi pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 termasuk 'cukup efisien' dengan rata-rata 86.8%, di tahun 2018 yang termasuk 'efisien' yaitu 70% dan di tahun 2021 termasuk 'tidak efisien' karena mencapai 100%.

Berdasarkan penghitungan Rasio Aktivitas pada tabel 5 dapat dilihat bagaimana pemerintah mengutamakan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal nya secara optimal, penghitungan Rasio Aktivitas Pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 berdasarkan belanja operasinya termasuk kedalam ketegori baik dengan rata-rata 79.2%, dan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014 dilihat dari rasio Aktivitas

belanja operasinya. Perhitungan Rasio Aktivitas berdasarkan belanja modal masih termasuk kedalam kategori 'tidak baik', dengan rata-rata 17.6% dan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2014 lebih baik dibandingkan dengan Kinerja keuangan pemerintah pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 jika dilihat dari rasio Aktivitas dalam belanja modalnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi yang memberikan gambaran kontribusi PAD terhadap keseluruhan total pendapatan bisa dikatakan masih "sangat kurang". (2) Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang memberikan gambaran kemampuan suatu daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya bisa dikatakan "sangat kurang". (3) Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 dilihat dari Rasio efektivitas yang memberikan gambaran kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan bias dikatakan "efektif". (4) Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 dilihat dari Rasio efisiensi yang memberikan gambaran perbandingan antara besarnya biaya pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima bisa dikatan" cukup efisien" di tahun 2017, 2019, dan 2020, di tahun 2021 dikatakan "tidak efisien" , hanya di tahun 2018 yang bisa dikatakan "Efisien". (5) Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 dilihat dari Rasio

Aktivitas yang memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah mengutamakan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal, pada belanja operasi bisa dikatakan "baik" dan belanja modal nya bisa dikatakan "tidak baik".

DAFTAR RUJUKAN

- Aljufri., Arini., Sherly, Novianti., 2019., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.jurnal akuntansi Kompetif, Online, Vol.2, No.3, September 2019. hal 102-107.
- Asrinda, Dizzy, siswi, Ramadhani ., Nur Hisamuddin., Moch Shuthoni, 2019, Analisis Rasio keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa(Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 17, No.1 Tahun 2019, hal 1-12.
- Fahmi, Irham., 2017, Analisis Laporan Keuangan Bandung:Alfabeta.
- Faizah, K. S. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018 . Jurnal Akuntansi Kompetitif,, Online, Vol. 4, No. 3 September , hal. 241-254.
- Hafiz, Abdul, Tanjung., 2015, Akuntansi keuangan Daerah Berbasis AkruaI untuk Skpd, Bndung: Alfabeta.
- Halim, Abdul., Syan. Kusufi, 2019, Akuntansi Sector Public, Jakarta: Salemba Empat.
- Hery., 2014, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Idris, Muhammad, Patarai., 2016., Kinerja Keuangan Daerah , Makassar :De La Macca.
- Kusumadewi, Wahidah, Niken. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014.,. Jurnal EMBA, Maret, Vol 4, No.1 . hal.634-644.
- Mega Oktavia, Ropa., (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA, Vol. 4, No 2 Juni , hal. 738-747.
- Muhammad,Zuhri.,Ahmad, Soleh. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu, 187-195.
- Muindro Renyowijoyo, 2013, Akuntansi Sektor Publik , Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Neneng, Salmiah., Satria Tri, Nanda., Intan, Adino., 2022, Peranan Direktur BUMDes Dalam Meningkatkan Kinerja., Jurnal Akuntansi Kompetitif, Online., Vol. 5, No. 1, Januari 2022, hal. 66-75.
- Omar, Sakti Rambe.,Elina., Rasdianto, 2016, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI, Jakarta: Salemba Empat.
- Satria, Tri ,Nanda., Ika, Berty., G.Yulia, Novita,Sari., Raisya, Zenita., 2022. Analisis Value for Money Pada kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.Jurnal Akuntansi Kompetif, Online .Vol. 5, No 1, Januari 2022. hal 56-65
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Hery, 2016, Analisis Rasio Keuangan Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota Mataram jurnal distribusi,Vol.7,No 1- maret 2019, hal 81 s.d 92.
- Rachmat, Trijono.,2015, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Depok Timur : Paps Sinar Sinanti.
- Ratmono, Dwi., Mahfud, Sholihin, 2017, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Semarang/Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Reni, Farwitawati., Bambang ,Suroto., Hadiyati., 2016 Analisis Implementasi Anggaran Berbasis

Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten
Siak Provinsi Riau. Jurnal ilmiah
Ekonomi dan Bisnis. Vol. 14, No. 2,
September 2016. Hal,208-228